

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakanya inovasi Mal Pelayanan Publik di Kabupaten telah tercapai dengan adanya integrasi layanan dengan menggabungkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu tempat, melakukan kegiatan promosi investasi untuk menjaga iklim investasi di daerah, serta pendampingan pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi para investor dengan manfaat berupa adanya perkembangan yang signifikan terhadap jumlah perijinan yang masuk, artinya banyak investor yang masuk ke Kabupaten Batang dan menanamkan modalnya di daerah tersebut sehingga turut serta membuka lapangan pekerja baru bagi masyarakat. Pelayanan di MPP Batang juga sudah cukup efektif dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana, ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, keterbukaan informasi kepada masyarakat ataupun investor, jaminan kemudahan administrasi khususnya dalam perijinan investasi, kualitas dan kemampuan petugas yang selalu melayani pemohon dengan penuh perhatian.

Faktor yang mendorong pelaksanaan inovasi Mal Pelayanan adalah: (1) dukungan regulasi dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan MPP, (2) dukungan dari *Stakeholder* dalam mengusahakan penyelenggaraan MPP, (3) daya tarik potensi investasi di Kabupaten Batang, (4) adanya gagasan-gagasan

perbaikan inovasi menjadi lebih baik, (5) adanya keinginan besar dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

Faktor yang menghambat inovasi tersebut adalah: (1) adanya sistem pelayanan yang belum sepenuhnya terintegrasi, (2) kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, (3) keterbatasan tempat di Mal Pelayanan Publik, (4) kurangnya dukungan kegiatan promosi penanaman modal, dan (5) minimnya pembuatan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh perusahaan (6) kondisi pandemi Covid-19.

4.2 Saran

Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah:

1. Pelaksanaan proses penerbitan perijinan investasi sangat membutuhkan integrasi, baik integrasi teknologi maupun integrasi antar dinas dan hierarki pemerintahan terkait. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Batang melalui DPMPTSP perlu melakukan komunikasi yang lebih intens dengan hierarki pemerintah di bawahnya khususnya pihak kecamatan dan desa untuk menghindari oknum aparaturnya yang terkesan mempersulit proses perijinan investasi sehingga para pemohon perijinan investasi akan merasa lebih mudah dalam mengurus perijinannya.
2. Perlunya pengembangan inovasi pelayanan yang ada di MPP Batang kedepannya, tentunya sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung proses pengembangan tersebut. Maka dari itu DPMPTSP Kabupaten Batang perlu melakukan pendidikan dan pelatihan pada

para pegawai yang sudah ada ataupun jika masih dirasa kurang dapat melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.

3. Untuk menarik minat para investor agar dapat berinvestasi di Kabupaten Batang, diperlukan kegiatan promosi investasi yang lebih optimal. Maka dari itu, diharapkan adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Batang terutama pada peningkatan anggaran belanja untuk kegiatan promosi investasi sehingga kegiatan promosi investasi yang dilakukan oleh DPMPTSP menjadi lebih optimal.